

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anderson, James E. (2000), *Public Policy Making*, Boston: Houghton Mifflin.
- Budi Winarno. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press
- Fahmi, Irham. (2012). *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung : Alfabeta.
- Gelinas, Ulrich and Dull, B. Richard, (2012), *Accounting Information Systems*. Ninth Edition, South Western Cengage Learning, 5191, Natorp Boulevard Mason, USA.
- George R Terry. (2006). *Asas-Asas Manajemen*. Cetakan ke 5. Jakarta: PT Alumni
- Handoko*, T. Hani dan Reksohadiprodjo. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia dan Perusahaan*. Edisi Kedua. BPFE: Yogyakarta
- Hidayat, Dayat (2008). *Evaluasi kinerja dan pengembangan model kelembagaan pengawas daerah*. Wacana kinerja Vol 11 No 1 Maret 2008.
- Ismail Solihin (2012). *Pengantar Manajemen*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Kasmir. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik)*. Depok: PT Rajagrafindo Persada
- Makmur (2011). *Efektifitas kebijakan kelembagaan pengawasan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Mardalis (2004). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Moleong*, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Nawawi, Ismail. (2009). *Prilaku Administrasi Kajian, Teori dan Praktis*. Surabaya: ITSPers.
- Singarimbun*, Masri dan Sofian Effendi, (2008). *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES
- Sugiyono (2015). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sutoro Eko*. (2003). *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta. Ire Press,
- Suyadi. (2013). *Implementasi Dan Inovasi*. Jakarta: Rosda.
- Tahir, Arifin. (2014). *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Cetakan Kesatu. Bandung: Alfabeta CV
- Usman Effendi. (2014). *Asas Manajemen*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Waluyo. (2007). *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, Dan Implementasi) Dalam*

Pelaksanaan Otonomi Daerah. Bandung: Mandarmaju.

Wibowo, (2009). Manajemen Kinerja. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Widjaja, H (2012). Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh. Jakarta: PT Rajagravindo Persada.

Winarni (2000). Manajer dan manajemen. Bandung: Citra Adhitya Bakti.

Jurnal

Ainun, St. Mardiyah dan Nurlinah (2019). Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Pao Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 12, Nomor 2, Juli 2019 (108-115) ISSN 1979-5645, e-ISSN 2503-4952

Arianto, Oldi Pengemaman (2013). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi pengawasan pemerintahan di Desa Lompad Kecamatan Ranoipo Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Eksekutif Vol 1 No 4. Publisher Sam Ratlangi University.

Awaeh, Stewar, Johannis E. Kaawoan, dan Josef Kairupan (2017). Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan (Studi di Desa Sereh 1 Kecamatan Lirung Kabupaten Talaud). Jurnal Eksekutif. Vol 1 No 1 Tahun 2017

Budiono (2010). Evaluasi peranan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Grudo, Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi dalam era otonomi daerah. Media Soerjo Vol.6 No 1 April 2010.

Haryani, Dian dan Armansyah Matondang (2016). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan. Jurnal Ilmu Administrasi Publik. P-ISSN-2549-9165 e-ISSN-2580-2011 Vol 4 no 1 Th 2016. Hal 74- 85

Gusti, I Made Bayu Nugraha, I Gusti Bagus Suryawan dan I Wayan Arthanaya (2021). Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai Lembaga Pengawas Terhadap Kinerja Kepala Desa di dalam Pemerintahan Desa. Jurnal Interpretasi Hukum. ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 3. Desember 2021, Hal. 584-589

Irma, Ade Suryani (2020). Optimalisasi Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Bidang Pengawasan Pemerintah Desa. PASira: Journal of Public Administration Musi Raya Vol. 3 No. 1, 28 February 2020, FISIP UNMURA P-ISSN 2089-4651.

Made. I Indrayana, I Wayan Parsa dan I Nengah Suharta (2016). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Kinerja Kepala Desa di Desa Antap Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan. Jurnal Kerta negara. eISSN 2303-0585. Vol 04 No 02 Februari 2016

- Malik, Sofian (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal IUS Constituendum*. p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842. Vol 5 No 2 Tahun 2020. Hal 325-343
- Maxno, Ishak Bagea, Asrul (2021). Implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pengawasan Kepala Desa di Desa Hambawa Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran (JPP)* Vol. 2 No. 1 Januari Tahun 2021
- Naimun, Joko Mardiyanto (2018). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Keji Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Tahun 2016 Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Jurnal Bedah Hukum*, Vol.2, No.1, April 2018, 26-37
- Napir, Suaib dan Muhammad Saad, Nurlinah (2015). Penguatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tallambalao Kabupaten Majene. *Jurnal Analisis*, Juni 2016, ISSN 2302-6340. Vol.5 No.1 : 68 – 75.
- Ndruru, Odaligo dan Ridahayati Halawa (2020). Kinerja Kepala Desa dalam Pelayanan Publik di Desa Borowosi Kecamatan Ulunoyo Kab Nias Selatan.(Studi: Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan). *Jurnal Governance Opinion*. ISSN 2716-3407 Vol 5 No 2 Tahun 2020. Hal 129-135
- Nur, Heni Irfiani (2017). Pengawasan kinerja pemerintah desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kantor Desa Karangampel Kecamatan Barebeg Kabupaten Ciamis. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Ciamis*
- Pendi (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan dalam Pemerintahan Desa Sebulu Modern Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara. *eJournal Administrasi Negara* Volume 5. Nomor 3. 2017: 6119-6128
- Rafiq, Aunur dan Muhamad Asrizal (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. E-ISSN : 2622-934X P-ISSN : 2502-9757. Vol. 6, No. 2 / 2020.
- Rina primadha (2008). “Peranan Fungsi Manajemen Dalam Menciptakan Kondisi Perusahaan Yang Sehat” *Jurnal Manajemen Bisnis*, Volume 1 Nomor 3, edisi 2 Mei .hal. 86
- Risala, Fahmi (2013). Peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Rembun Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan Periode 2008-2014. *Journal of politic and Government Studies* Vol 2 No 1 page 209-219.
- Rusdia, Ujud dan Dadang Wirawan (2020). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

- (BPD) dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Desa di Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung. *Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung* Volume 4, Nomor 1, April 2020 (139-153) (P-ISSN 2087-4742)
- Sentot Harman. (2010). “Fungsi Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Manajemen Korporasi”. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*. Volume 2 Nomor 1. edisi 1 Maret. hal. 19
- Tarsim dan Erga Yuhandra (2018). Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan Fungsi Pengawasan terhadap Pemerintah Desa (Studi di Kabupaten Kuningan). *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, p-ISSN 2354-5976, e-ISSN 2580-7382 Volume 05 Nomor 01, Januari 2018.
- Yuliananingsih dkk (2019). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi kinerja kepala desa di desa sungai besar Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Tenkapuas Hulu. *Social Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial* Vol. 6, No. 1, Juni

Peraturan-Peraturan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa